



**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR KESEHATAN
DAN PENDIDIKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
MELALUI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan⁴

Oleh :

EPI HANDANI BR TARIGAN
1515210130

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui Pengeluaran Pemerintah sector kesehatan dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia sebagai variable intervening. Penelitian ini menggunakan alat analisis jalur (Path Analysis) dan data runtut waktu (Times Series) pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 yang di olah dengan aplikasi SPSS 16. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan kuantitatif. Pengeluaran Pemerintah Sektor kesehatan sebesar 0,322 lebih kecil dari nilai pengaruh tidak langsung sebesar 1,14 artinya bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel intervening di Kota Medan. Hasil analisis kedua menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan sebesar 0,626 lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung sebesar 0,116, artinya bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel intervening di Kota Medan.

Kata Kunci : Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Sektor Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia

ABSTRACK

This study aims to analyze and determine government expenditure in the health and education sectors on economic growth through the human development index as an intervening variable. This study uses path analysis tools and time series data from 2010 to 2017 which are processed with the SPSS 16 application. This research uses descriptive and quantitative analysis methods. Public health sector expenditure is 0.322 smaller than the value of the indirect effect of 1.14, which means that government spending in the health sector has a significant effect on Economic Growth through the Human Development Index as an intervening variable in Medan City. The results of the second analysis show that the Education Sector Government Expenditure is 0.626 greater than the value of the indirect effect of 0.116, meaning that the Education Sector Government Expenditure has no effect on Economic Growth through the Human Development Index as an intervening variable in Medan City.

Keywords: Health Sector Government Expenditure, Economic Growth Sector and Human Development Index

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian	15
F. Keaslian Penelitian.....	15

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	17
1. Teori Pertumbuhan Ekonomi	17
2. Teori Mankiw.....	21
3. Teori Modal Manusia	24
4. Teori Indeks pembangunan Manusia	26
5. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia	28
6. Konsep Pengeluaran Pemerintah	30
7. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan	32
8. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	34
B. Penelitian Terdahulu.....	37
C. Kerangka Konseptual	42
D. Hipotesis	44

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Variabel Penelitian	46
B. Definisi Operasional Variabel	46
C. Tempat dan Waktu Penelitian	47
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Metode Analisis Data.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	51
1. Sejarah Kota Medan	51
2. Letak Geografis	54
3. Kondisi Alam dan Penduduk Kota Medan	57
4. Sarana Prasarana Kota Medan	59
a. Fasilitas Kesehatan	59
b. Fasilitas Pendidikan	60
B. Gambaran Hasil Penelitian	60

1. Pengeluaran Pemerintah	60
2. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan	61
3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	62
C. Hasil Analisis Data	63
1. Hasil Pengujian Asumsi Klasik	63
a. Uji Normalitas Data	63
b. Uji Multikolinieritas Data	64
c. Uji Autokorelasi Data	65
2. Hasil Analisis Path Analysis	65
D. Interpretasi Hasil Path Analysis	68
1. Pengaruh Pengeluaran pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening	68
2. Pengaruh Pengeluaran pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening	70
E. Pembahasan	71
1. Pengaruh Pengeluaran pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening	71
2. Pengaruh Pengeluaran pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening	74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sampai saat ini sehingga penulis menyelesaikan skripsi untuk dapat mencapai gelar sarjana pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Adapun judul yang penulis sajikan adalah sebagai berikut : **”Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening Di Kota Medan”**.

Dalam kesempatan ini, penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Bakhtiar Efendi, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Dr Muhamad Toyib Daulay, SE., MM selaku dosen pembimbing I penulis yang sudah banyak memberikan arahan, motivasi serta kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Diwayana Putri Nasution, SE., M.Si selaku dosen pembimbing II penulis yang sudah memberikan banyak saran, masukan, motivasi, serta kemudahan di dalam pembuatan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak/Ibu dosen yang telah mengajarkan ilmunya selama perkuliahan di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Seluruh Staff pegawai departemen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
8. Kepada kedua orang tua saya dengan Ayahanda Antonius Tarigan dan Ibunda Elia Derti Br Hutagalung yang selalu memberikan semangat dan doa serta pengorbanan moril, materil yang tidak dapat dinilai dengan apapun.
9. Serta kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi-motivasi dalam perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dengan segala kekurangannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang akan digunakan demi perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap dengan selesainya skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat bagi teman-teman dan pembaca lainnya.

Medan, Agustus 2019

Penulis

EPI HANDANI BR TARIGAN

NIM. 1515210130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perekonomian tercermin dari hasil pembangunan, dimana pembangunan harus dilakukan dalam tujuan untuk mengentaskan pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan dengan salah satunya adalah dalam perbaikan pendapatan per kapita masyarakat dan perbaikan di berbagai sektor bidang usaha. Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*) riil di wilayah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi secara umum biasanya diukur dari peningkatan Produksi Domestik Regional Bruto dari suatu daerah atau negara yang menjadikan objek penelitian. Cara lain adalah dengan melihat perbaikan pendapatan per kapita, dimana yang dilakukan secara makro adalah dengan cara mengusahakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat. Dari hasil Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) di berbagai sektor lapangan usaha, baik sektor basis atau unggulan maupun sektor non basis ataupun atas sektor konsumsi, investasi, net perdagangan internasional dan pemerintah dengan

memicu peningkatan output usaha namun juga sebaiknya disertai dengan penurunan tingkat pengangguran juga dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi yg sedang terjadi. Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting yang harus ada di dalam pembangunan ekonomi, dimana laju pertumbuhan ekonomi diharapkan harus lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk, dengan demikian peningkatan pendapatan perkapita dapat tercapai. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dengan sendirinya ataupun dengan campur tangan pemerintah harus dapat dinikmati masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi ini sangat menyangkut seluruh aspek yang ada di suatu daerah, khususnya tipikal sektor-sektor lapangan usaha sebagai sumber *output* dan pendapatan (*income*) masyarakatnya. Aspek ekonomi yang menyangkut masalah pertumbuhan ekonomi menurut penulis secara umum adalah tingkat produksi domestik regional bruto, inflasi yang terjadi, realisasi modal yang terjadi yang memungkinkan pertumbuhan sektor ekonomi bertumbuh dan tingkat angkatan kerja bertumbuh juga.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari tujuan suatu ekonomi makro. Hal ini didasari oleh tiga alasan. Pertama, penduduk semakin bertambah. Bertambahnya penduduk tersebut ini berarti akan menyebabkan angkatan kerja juga selalu meningkat pula. Pertumbuhan ekonomi akan mampu menyediakan lapangan pekerjaan oleh angkatan kerja. Jika pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja, hal ini mendorong terjadinya pengangguran. Kedua, selama keinginan dan kebutuhan selalu tidak terbatas, perekonomian harus selalu mampu memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut.

Ketiga, lapangan usaha menciptakan pemerataan ekonomi melalui retribusi pendapatan yang akan lebih tercapai dalam periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi dalam tahap pembangunan ekonomi pada suatu daerah. Karena penduduk mengalami peningkatan dan berarti pula kebutuhan ekonomi juga akan bertambah. Oleh sebab itu bisa diperoleh melalui peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau disebut PDRB atas dasar konstan setiap tahun. Jadi dalam arti ekonomi makro pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan PDRB atas dasar harga konstan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang cukup meningkat dalam segi ekonomi merupakan cerminan dari tingkat pendapatan masyarakat supaya lebih baik di daerah tersebut, sedangkan dalam bidang non ekonomi peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesehatan, pendidikan, perumahan, lingkungan hidup dan aspek lainnya dalam masyarakat. Dengan demikian Produk Domestik Regional Bruto secara agregatif menunjukkan bahwa kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut.

Dari data yang ada dalam publikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan dapat dilihat beberapa series data tentang laju pertumbuhan ekonomi baik secara berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. Laju pertumbuhan ekonomi terdapat dua macam yang pertama laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga berlaku dan kedua laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan.

Secara terperinci data laju pertumbuhan PDRB Kota Medan dari tahun 2010-2017 terdapat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan Tahun 2010-2017 Menurut Sektor/Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Dalam Persen)

Lapangan Usaha	[Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDRB adhk 2010 (Persen)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.32	-2.95	0.79	1.09	6.39	5.01	3.96	6.31
B. Pertambangan dan Penggalian	-3.46	-1.28	-5.16	-3	-5.01	-4.40	-2.73	-2.68
C. Industri Pengolahan	3.23	5.71	3.69	1.93	2.39	1.59	4.90	1.90
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.39	13.44	-7.33	-16.73	2.45	-10.12	11.04	9.54
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	4.11	3.78	4	3.86	6.67	8.01	6.42	9.96
F. Konstruksi	7.49	9.60	8.92	8.43	8.95	8.09	8.05	7.16
G. Perdagangan Besar dan Eceran,	9.59	6.88	8.82	8.64	9.34	6.54	6.53	6.38
H. Transportasi dan Pergudangan	5.76	8.27	8.47	-11.76	-11.92	3.46	6.46	7.94
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan	7.01	11.20	8.63	6.55	9.63	8.63	6.04	6.81
J. Informasi dan Komunikasi	6.87	9.63	9.84	9.93	9.55	3.83	7.35	8.85
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	7.53	8.61	7.41	6.98	4.78	5.57	3.89	0.48
L. Real Estate	7.83	8.55	8.20	8.04	8.70	7.51	5.02	7.74
M,N. Jasa Perusahaan	5.99	9.47	6.14	6.78	6.66	4.94	6.65	7.95
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Waiib	12.94	11.95	10.65	7.29	7.09	3.32	2.19	2.56
P. Jasa Pendidikan	5.52	5.56	8.46	8.30	8.16	8.54	6.70	4.29
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.10	12.26	12.06	9.87	11.81	9.95	9.40	8.46
R,S,T,U. Jasa Lainnya	6.87	6.98	5.91	8.25	8.05	6.97	7.16	8.63
PDRB	7.02	7.79	7.66	5.36	6.07	5.74	6.27	5.81

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan Kota Medan atas dasar harga konstan dan dilihat pada total PDRB dari tahun 2010 sampai 2011 mengalami peningkatan kemudian tahun berikutnya pada 2012 terjadi penurunan sangat sedikit saja dan tahun berikutnya juga pada tahun 2013 mengalami penurunan lagi dan tahun berikutnya juga 2014 terjadi kenaikan yang signifikan tahun selanjutnya tahun 2015 mengalami penurunan lagi dan tahun 2016 terjadi mengalami kenaikan dan hingga tahun 2017 terjadi lagi penurunan. Maka laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan masih atas rata-rata berkisar 5 % dan disimpulkan pertumbuhan ekonomi masih keadaan sangat baik.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pembangunan manusia. Pada hakekatnya pembangunan adalah pembangunan manusia, sehingga perlu diprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan ini dalam penyusunan anggaran (Priyo, 2009). Prioritas belanja dalam rangka peningkatan pembangunan manusia akan meningkatkan tingkat dalam kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan manusia itu sendiri dapat dicermati dari besar kecilnya pembangunan manusianya. Apabila pembangunan manusianya mengalami peningkatan, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat akan selalu mengalami peningkatan yang signifikan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang mencakup seperti usia hidup, pengetahuan dan kehidupan layak. Apabila suatu daerah mampu mengelola IPM dengan baik maka dapat dipastikan sumber daya alam dan manusianya akan dapat bersinergi dengan simultan. Hal ini akan memicu peningkatan daya saing daerah di setiap daerahnya, karena apabila sumber daya manusia di setiap daerah diberdayakan dengan baik maka otomatis sumber daya manusia tersebut mampu mengolah dan mengelola sumber daya alamnya dengan baik.

Hal ini tentu saja dapat terwujud apabila pemerintah mampu memberikan fasilitas dan infrastruktur yang baik sebagai wadah masyarakat untuk meningkatkan tingkat ekonominya masing-masing yang dimana nantinya hal tersebut dapat mempengaruhi daya daing masyarakat serta daya saing daerah. Indeks Pembangunan Manusia juga dapat dikatakan sebagai variabel yang sangat berpengaruh langsung terhadap daya saing daerah. Seperti penjelasan diatas apabila daerah mampu mengelola indeks pembangunan manusia dan sumber daya

manusia yang ada maka otomatis keduanya akan bersinergi dengan baik dan nantinya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya saing daerah.

Salah satu alat ukur yang lazim digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah indeks pembangunan manusia. Pada tahun 1990 *United Nation Development Program* (UNDP) memperkenalkan “*Human Development Index* (HDI)” atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Posisi manusia selalu dijadikan tema sentral dalam setiap pembangunan karena selain menjadikan subjek manusia juga menjadi objek sasaran pembangunan tersebut. Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator setiap kemajuan suatu negara atau daerah.

Suatu negara dikatakan maju tidak bisa hanya dihitung dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) saja tetapi juga dapat dihitung melalui aspek peningkatan angka harapan hidupnya serta dari aspek pendidikan masyarakat itu sendiri. Upaya membuat suatu indikator pencapaian pembangunan manusia harus dapat memberikan dampak atau gambaran tentang dari program pembangunan manusia tersebut. Pembangunan manusia merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan di suatu Negara.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tujuan bangsa Indonesia diantaranya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran utama bagi negara-negara sedang berkembang. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi, maka kesejahteraan

masyarakat akan meningkat. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini dan generasi mendatang dibutuhkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan sendiri terdiri dari tiga pilar, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Karena pengembangan sumber daya manusia memiliki kapasitas yang besar untuk kemajuan suatu negara Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan modal manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan. Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas juga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

Pemerintah melakukan pengeluaran atau investasi yang ditujukan untuk pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah tersebut digunakan untuk membiayai sektor publik yang lebih penting dan menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin pada indeks pembangunan manusia.

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan merupakan dua dari beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia. Kedua faktor tersebut, merupakan layanan jasa yang normatifnya disediakan oleh pemerintah, bukan bertumpu pada swasta terlebih pasar. Dalam hal peningkatan pembangunan manusia, pendidikan dan kesehatan yang baik bagi setiap manusia bisa terwujud melalui alokasi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan meningkatnya alokasi pengeluaran pemerintah disektor tersebut maka akan meningkatkan prioduktivitas penduduk sehingga bisa meningkatkan

pembangunan manusia. Untuk selanjutnya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan dapat disebut sebagai investasi publik (Astri dkk, 2013).

Indeks Pembangunan Manusia ialah indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar bisa dilihat dari kualitas fisik dan non fisik penduduk pada suatu daerah. Adapun tiga indikator tersebut adalah indikator kesehatan yang dimaksud ialah dengan angka harapan hidup, indikator pendidikan yang dimaksud ialah dengan angka melek huruf serta rata-rata lama sekolah dan indikator ekonomi pendapatan (upah) yang dimaksud ialah seberapa besar daya beli masyarakat.

Tabel 1.2
Indeks Pembangunan Manusia Kota Medan Tahun 2010-2017

No	Tahun	IPM (%)
1	2010	77.02
2	2011	77.54
3	2012	77.78
4	2013	78.05
5	2014	78.26
6	2015	78.87
7	2016	79.34
8	2017	79.98

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Medan

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa IPM Kota Medan selalu mengalami peningkatan yang sangat bagus menandakan bahwa kesejahteraan masyarakat terus meningkat dari tahun ke tahun. Maka dari itu IPM Kota Medan merupakan hal yang positif bagi Kota Medan dalam membentuk sumber daya yang unggul. Peningkatan IPM Kota Medan disebabkan oleh pusat ekonomi dan pendidikan serta akses layanan kesehatan yang mudah terjangkau oleh masyarakat.

Dengan demikian ada dua sektor yang harus perlu di perhatikan oleh pemerintah sehubungan dengan upaya memperluas kesempatan masyarakatnya

mencapai hidup yang layak yaitu dengan pendidikan dan kesehatan. Maka dari itu melalui alokasi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan sektor pendidikan, dengan meningkatnya alokasi pengeluaran pemerintah di sektor publik tersebut maka akan terjadi peningkatan produktivitas masyarakat itu sendiri.

Tabel 1.3
Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan dan APBD
Kota Medan Tahun 2010-2017 (Dalam Rupiah)

No	Tahun	Sektor Kesehatan (Rp)	Sektor Pendidikan (Rp)	APBD (Rp)
1	2010	294.671.898.434	733.266.652.917	2.582.065.326.653
2	2011	373.568.879.990	983.774.581.356	3.395.728.853.449
3	2012	423.878.270.895	983.289.538.550	4.080.935.662.619
4	2013	389.133.311.196	1.109.133.107.469	4.237.560.638.891
5	2014	495.610.513.080	1.079.853.934.544	4.625.169.942.881
6	2015	627.008.258.405	1.162.361.929.743	5.467.952.757.114
7	2016	691.863.259.661	1.195.515.428.591	5.737.738.289.895
8	2017	615.211.142.256	883.069.743.930	5.554.084.308.979

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Medan

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dari tahun 2010 sampai 2012 mengalami peningkatan kemudian tahun berikutnya tahun 2013 terjadi penurunan tetapi tahun 2014 mengalami kenaikan lagi tahun berikutnya tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami peningkatan yang sangat signifikan tetapi tahun berikutnya tahun 2017 mengalami penurunan yang sangat dalam. Kemudian dari perkembangan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan mulai tahun 2010 sampai dengan 2016 perkembangan pengeluaran pemerintah selalu mengalami peningkatan yang sangat signifikan hanya saja tahun 2017 pengeluaran pemerintah mengalami penurunan. Dan perkembangan APBD Kota Medan dari tahun 2010 hingga tahun 2017 selalu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Melalui APBD tersebut yang diterapkan oleh pemerintah Kota Medan agar anggarannya

digunakan sebaik-baiknya dan tepat sasaran dalam pembangunan agar masyarakat merasakannya dalam pembangunan yang tersedia.

Kesehatan merupakan suatu kondisi yang sejahtera dan sehat dari fisik, batin maupun jiwa yang membuat manusia atau seseorang melakukan suatu kegiatan dan akan menghasilkan produktivitas dari kesehatan tersebut. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan kesehatan juga menjadi fundamental untuk membentuk manusia yang lebih baik pada pembangunan kesehatan yang baik juga. Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2009 pasal 171 menyatakan bahwa menjadikan alokasi belanja di bidang kesehatan mutlak di penuhi (*mandatory spending*).

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN diluar gaji, sementara Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran Kesehatan sebesar 10% dari APBN diluar gaji. Menurut lembaga WHO, kesehatan merupakan keadaan baik sepenuhnya secara fisik, mental, sosial. Kesehatan juga bukanlah karena tidak ada penyakit atau kelemahan dan bukan pula sekedar soal medis semata, melainkan menyangkut keadaan sosial di masyarakat.

Pengertian sehat menurut UU Pokok Kesehatan No. 9 tahun 1960, Bab I Pasal 2 adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan (jasmani), rohani (mental), dan sosial, serta bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Batasan kesehatan tersebut di atas sekarang telah diperbaharui bila batasan kesehatan yang terdahulu itu hanya mencakup tiga dimensi atau aspek, yakni: fisik, mental, dan sosial, maka dalam Undang- Undang NO. 23 Tahun 1992,

kesehatan mencakup aspek, yakni: fisik (badan), mental (jiwa), sosial, dan ekonomi.

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Investasi dalam suatu pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun sarana dan prasarana dan mengembangkan sistem pendidikan yang baik. Jadi alokasi pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan suatu wujud yang nyata dari investasi agar untuk meningkatkan mutu masyarakat itu sendiri. Dalam bidang pendidikan, bahwa pendidikan salah satu pilar yang menjadi kemajuan suatu negara. Pada tahun 2002 adanya amandemen UUD 1945 keempat tentang pendidikan, pasal 31 berbunyi:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan manusia yang diatur dalam undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional.

Menurut Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan oleh DPR pada tahun 2003 pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib terjamin tersedianya anggaran guna

penyelenggaraan pendidikan bagi setiap warga yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Pendidikan adalah suatu modal manusia, oleh karenanya pendidikan dapat memberikan kontribusi bagi dalam pembangunan. Hal ini pendidikan pada dasarnya merupakan bentuk dari tabungan menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat.

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai pentingnya pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan sektor pendidikan sebagai keseriusan pemerintah dalam menangani masalah peningkatan pembangunan manusia, peneliti tertarik ingin meneliti lebih jauh mengenai “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening Di Kota Medan”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan masih belum baik terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Medan dari tahun 2010-2017.
- b. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan masih belum baik terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Medan dari tahun 2010-2017.
- c. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan masih belum baik terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Medan dari tahun 2010-2017.
- d. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan masih belum baik terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Medan dari tahun 2010-2017.

- e. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan masih belum baik terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Indeks Pembangunan Manusia di Kota Medan dari tahun 2010-2017.
- f. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan masih belum baik terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Indeks Pembangunan Manusia di Kota Medan dari tahun 2010-2017.

2. Batasan Masalah

Untuk mencegah mengembangnya permasalahan maka penulis membatasi masalah untuk lebih terperinci dan jelas sehingga pemecahannya terarah dan berhasil. Penulis membatasi menganalisis Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia Di Kota Medan pada tahun 2010 sampai tahun 2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka terdapat rumusan masalah yang dapat diambil sebagai kajian dalam penelitian yang akan dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah data penulisan proposal ini. Selain itu, rumusan masalah ini diperlukan sebagai suatu cara untuk mengambil suatu keputusan dari penulisan penelitian. Maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Apakah pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Medan ?
2. Apakah pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Medan ?

3. Apakah pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan ?
4. Apakah pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan ?
5. Apakah pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Medan ?
6. Apakah pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Medan ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan dari penelitian diatas adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Medan.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Medan.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan.
4. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan.
5. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Medan.

6. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Medan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini mengenai belanja daerah dalam suatu daerah adalah sebagai berikut :

1. Menambah pengetahuan pada studi ekonomi sumber daya manusia khususnya dalam hal peningkatan pembangunan manusia dan sumbangan pemikiran kepada pemerintah Kota Medan dalam menentukan suatu kebijakan.
2. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan, serta hasil dari penelitian ini sebagai referensi atau acuan untuk semua pihak yang ingin mau melakukan penelitian lebih lanjut.

F. Keaslian Penelitian

Penelitian ini di dapat dari penelitian Mochhammad Yuli Arifin (2015). Universitas Jember (UNEJ), dalam penelitian ini mengenai “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 2006-2013. Penelitian ini menggunakan data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari internet, dengan menggunakan metode Kuantitatif dan menggunakan alat metode Regresi data panel.

Hasil analisis menunjukkan bahwa, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap indeks pembangunan manusia Jawa Timur tahun 2006-2013, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Jawa Timur tahun 2006-2013.

Tabel 1.4 Originalitas Penelitian

No	Keterangan	Peneliti Terdahulu	Peneliti Sekarang
1	Lokasi Penelitian	Jawa Timur	Kota Medan
2	Tahun Penelitian	2015	2019
3	Data Penelitian	2006-2013	2012-2017
4	Metode Penelitian	Regresi Data Panel	Path Analysis

Berdasarkan perbedaan lokasi penelitian, tahun penelitian, data penelitian dan metode penelitian yang digunakan menjadi perbedaan yang membuat keaslian penelitian ini di buat pasti dengan baik. Dengan demikian, fokus utama adalah dilakukan terhadap sektor kesehatan dan pendidikan sehingga dapat memberikan gambaran secara baik dan mendalam.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Badan Pusat Statistika (2012:3), “Proses pembangunan ekonomi pada hakikatnya adalah upaya meningkatkan kapasitas perekonomian afggar mampu menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat”. Menurut Badan Pusat Statistika (2012), “Pertumbuhan ekonomi merupakan jumlah nilai tambah barang atau jasa yang di hasilkan dari seluruh kegiatan suatu daerah”.

Menurut Prawira (2018:3), “Tinggi rendahnya laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan tingkat perubahan kesejahteraan ekonomi meningkat, sementara perekonomian yang menurun atau pertumbuhan ekonomi denga niali negative berarti turunnya kesejahteraan ekonomi. Disisi lain tingkat pertumbuhan juga digunakan untuk mengevaluasi tepat atau tidaknya kebijakan yang telah di ambil sehubungan dengan peran pemerintah dalam perekonomian”.

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah masyarakat bertambah dan daerah, secara makro dapat dilihat dari peningkatan nilai Product Domestic Regioal Bruto setiap tahunnya PDRB diukur atas dasar harga konstan suatu daerah (Ulfi Maryati dan Endrawati, 2013).

Menurut Putu Ngurah Panji Kartika Jaya dan A.A.N.B Dwirandra (2014), “Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dari kegiatan perekonomian dimana hal tersebut berdampak pada jumlah produksi barang dan jasa yang semakin bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat”. Menurut Simon Kuznet, dalam buku pembangunan ekonomi di dunia ketiga “Pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada kependudukannya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan”.

Menurut M.P Todaro, dalam buku ekonomi pembangunan “Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses yang mantap dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan nasional yang semakin besar”. Pelaksanaan otonomi daerah tercapai melalui pertumbuhan ekonomi di sebabkan dengan adanya memberikan keleluasan pada pemda untuk mengurus atau mengembangkan dan menggali potensi yang di miliki masing-masing daerah tersebut. Adapun pertumbuhan ekonomi daerah dapat diprokasikan melalui Produk Domestik Bruto (PDRB), dimana PDRB itu merupakan totalitas dari keseluruhan nilai barang dan jasa yang di dapat dari seluruh kegiatan perekonomian daerah tersebut dapat dihitung melalui PDRB atas dasar harga konstan.

Terdapat dua prinsip penting dalam teori pertumbuhan baru (pertumbuhan endogen), prinsip yang pertama adalah pada teori ini lebih fokus kepada bagian kapital manusia antara lain seperti pengetahuan, keterampilan serta melatih individu. Kapital manusia dan pertumbuhan

memiliki keterkaitan yang dimana ketika perekonomian membaik (lebih baik) mereka akan lebih condong untuk melakukan menginvestasikan kepada masyarakat yang berkembang dengan bidang sekolah dan pada pekerjaan pelatihan.

Di lain hal tenaga kerja yang lebih sehat serta lebih produktif, mengarah kepada standar hidup yang berkembang. Prinsip yang kedua pada teori ini lebih menekankan terhadap adanya inovasi dibidang teknologi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pribadi sebagai pemicu dalam pertumbuhan produktivitas. Singkatnya teori ini berkaitan dengan penekanan terhadap formasi kapital manusia, ketika pembangunan dan kegunaan inovasi teknologi memerlukan tenaga kerja yang terampil (waluyo, 2002 dalam Winarti, 2014).

Teori pertumbuhan baru (pertumbuhan endogen) dapat dinyatakan dengan persamaan $Y = AK$. Dimana A mewakili teknologi dan K mewakili modal fisik dan sumber daya manusia. Asumsi yang dapat ditarik dari teori pertumbuhan baru (pertumbuhan endogen) yaitu bahwa investasi sektor publik dan swasta dalam sumber daya manusia dapat menghasilkan ekonomi eksternal dan terciptanya peningkatan produktivitas yang dapat membalikan kecenderungan hasil yang semakin menurun yang alamiah.

Di dalam teori pertumbuhan baru (pertumbuhan endogen) menyimpulkan bahwa investasi terhadap modal fisik dan modal manusia memiliki peran dalam menentukan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang serta mendorong peran aktif dari kebijakan publik dalam memacu pembangunan ekonomi melalui investasi yang dilakukan secara langsung

ataupun tidak langsung dalam pembentukan sumber daya manusia. Peran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi bisa dijelaskan pengaruhnya dalam perubahan konsumsi maupun pengeluaran untuk investasi publik.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan *output* nasional. Adanya perubahan *output* dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek. Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern.

Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis di dasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonom klasik antara lain Adam Smith, David Ricardo. Teori lain yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori ekonomi modern. Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan salah satu teori pertumbuhan ekonomi modern, teori ini menekankan arti pentingnya pembentukan investasi bagi pertumbuhan ekonomi.

Semakin tinggi investasi maka akan semakin baik perekonomian, investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif yang lebih panjang investasi akan menambah stok kapital. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu proses, *output* perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran

ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

2. Teori Mankiw

Mengatakan bahwa penganut teori endogen berpendapat bahwa asumsi pengembalian modal konstan (bukan semakin menurun) lebih bermanfaat jika diasumsikan secara lebih luas yaitu dengan memandang ilmu pengetahuan sebagai sejenis modal. Ilmu pengetahuan adalah input penting dalam produksi perekonomian baik produksi barang dan jasanya maupun produksi ilmu pengetahuan barunya. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat selama beberapa abad terakhir membuat sebagian ekonom berpendapat bahwa ada pengembalian ilmu yang meningkat.

Implikasi dari tabungan dan investasi pada modal manusia oleh teori pertumbuhan baru (pertumbuhan endogen) adalah tidak adanya kekuatan yang dapat menyamai tingkat pertumbuhan antar negara, dan tingkat pertumbuhan nasional yang konstan dan berbeda antarnegara tergantung pada besarnya tabungan nasional dan tingkat teknologi. Konsekuensi dari hal tersebut adalah sulitnya bagi negara yang mengalami miskin modal manusia dan fisik untuk menyamai tingkat pendapatan per kapita dari negara yang kaya kapital, meskipun tingkat tabungan nasionalnya sama besar.

Seperti yang dikemukakan oleh teori Neo-Klasik (*beyond the solow model*), menegaskan pentingnya transformasi pembangunan yang baik tidak hanya sebatas dari adanya peningkatan efisiensi alokasi dan akumulasi faktor modal dan tenaga kerja. pendidikan dan keterampilan merupakan hal yang penting menurut teori Neo-Klasik (*beyond the solow model*), teori ini menyimpulkan bahwa pendidikan tidak hanya mampu meningkatkan faktor tersebut, namun juga dapat meningkatkan wawasan faktor untuk dapat menerima suatu perubahan dan peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi (Prasetyo, 2008 dalam Winarti, 2014).

David Romer sebagai pencetus teori pertumbuhan baru (pertumbuhan endogen) dalam modelnya terdapat akumulasi modal fisik, pertumbuhan yang dimana *output* menyerupai model solow dengan fungsi :

$$Y(t) = K(t)^x H(t)^b [A(t)L(t)^{1-x-b}]$$

Dimana :

K : Modal Fisik

H : Sumber Daya Manusia (*Human Capital*)

A : Perkembangan Teknologi

L : Tenaga Kerja

Raharjo Adisasmita (2011) mengatakan bahwa indikator yang dipergunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Alasan yang mendasari pemilihan PDRB sebagai indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

- a. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian suatu daerah. Hal ini berarti

peningkatan PDRB mencerminkan pula peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.

- b. PDRB adalah dihitung atas dasar konsep arus barang. Maksudnya adalah perhitungannya PDRB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Aliran konsep ini memungkinkan kita untuk membandingkan jumlah output yang dihasilkan pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.
- c. Batas wilayah perhitungan PDRB adalah daerah (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan untuk mengukur sejauh mana kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah apakah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik.

Pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai kenaikan GDP rill per kapita. Produk Domestik Bruto Bruto (*Gross Domestic Product*) adalah nilai pasar keluaran total sebuah negara yang merupakan nilai pasar semua barang jadi dan jasa akhir yang diproduksi selama periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang beralokasi di dalam suatu negara. Kenaikan GDP dapat muncul melalui kenaikan penawaran tenaga kerja. Kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia dan kenaikan produktivitas. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

- a. Faktor sumber daya manusia (SDM)
- b. Faktor sumber daya alam (SDA)
- c. Faktor budaya
- d. Sumber daya modal

1. Teori Modal Manusia

Dalam setiap pelaksanaan pembangunan, tolak ukur keberhasilan dari proses pembangunan tersebut ditentukan dari indikator pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan ukuran perkembangan *output* dari suatu wilayah selama periode tertentu, sedangkan *output* tersebut menunjukkan produktivitas suatu wilayah akibat adanya kegiatan investasi yang dilakukan. Keputusan melakukan investasi diharapkan dapat memberikan pengembalian yang lebih besar dari biaya investasi yang telah dikeluarkan.

Pada umumnya investasi dilakukan dalam bentuk investasi fisik dan finansial di bidang usaha. Investasi dilakukan dengan mengorbankan pengeluaran pada saat ini untuk memperoleh suatu yang lebih besar di masa mendatang. Tidak hanya dilakukan dalam bentuk fisik, modal, maupun finansial di bidang usaha saja, investasi dapat dilakukan di bidang sumber daya manusia juga. Investasi di bidang sumber daya ini dilakukan untuk membentuk modal manusia (*human capital*) yang dimana akan memberikan imbalan berupa penghasilan yang lebih besar di masa mendatang.

Pada tahun 2012, Theodore W. Schultz pertama kali memperkenalkan teori modal manusia (*human capital*). Dalam teorinya Schultz menekankan bahwa manusia adalah suatu modal layaknya bentuk modal lainnya seperti mesin dan teknologi. Selain menekankan tentang hal tersebut, Schultz juga menegaskan bahwa pendidikan, pengetahuan, kesehatan serta keterampilan merupakan bentuk dari modal manusia.

Tentu investasi dalam modal sosial juga mendatangkan imbalan (penghasilan) dimasa mendatang sama seperti investasi dalam modal fisik. (Schultz, 2013 dalam Sari, 2014).

Menurut Todaro (2011) dalam Sari (2014), melalui bidang pendidikan dan kesehatan dapat dilakukan investasi modal manusia. Kedua bidang ini memainkan peranan yang amat penting, pendidikan dapat menentukan kemampuan suatu perekonomian untuk mengadopsi teknologi yang modern dan menciptakan pembangunan yang berkesinambungan. Selain itu kesehatan merupakan hal penting dalam peningkatan produktivitas. Dapat disimpulkan pendidikan dan kesehatan merupakan unsur penting dalam pertumbuhan dan pembangunan sebagai input dari fungsi produksi agregat.

Pendekatan pembangunan manusia dikembangkan untuk memberikan respon terhadap penekanan yang terlalu besar pada PDB per kapita sebagai indikator tunggal kemajuan manusia sebagai semua bangsa. Pendekatan pembangunan bersifat lebih luas daripada tujuan pembangunan milenium (*Millennium Development Goals*). Pembangunan milenium mempertajam pendekatan pembangunan manusia dan mengindikasikan peta jalan penyelenggaraan pembangunan manusia (K. Seeta Prabhu, 20012 : 2).

Human capital ini dapat menginvestasikan dirinya sendiri melalui berbagai bentuk investasi SDM, diantaranya pendidikan informal, pengalaman kerja, kesehatan, dan gizi serta transmigrasi (Fattah, 2012). Penerapan teori modal manusia dapat memunculkan ketimpangan pada pembangunan di sektor lain. Sektor yang dikesampingkandalam teori Modal Manusia adalah pembangan

pada sarana kebutuhan dasar masyarakat. Sementara itu, kebutuhan dasar masyarakat sejatinya merupakan sector yang lebih krusial, di mana akan menentukan derajat kesehatan masyarakat atau derajat kondisi fisik masyarakat. Dengan meningkatkan derajat hidup masyarakat (kesehatan). Maka langkah pembangunan lain seperti pendidikan akan lebih mudah untuk dilakukan.

4. Teori Indeks Pembangunan Manusia

Dalam UNDP (*United Nations Development Programme*), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (“*a process of enlarging people’s choices*”). Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup pada dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan sebetulnya harus dianalisis serta dipahami betul dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana dikutip dari UNDP (*Human Development Report, 2011 : 103*), Konsep pembangunan manusia pada umumnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun secara spritual.

Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik maupun mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai dari seberapa besar permasalahan yang dapat diatasi terlebih lagi permasalahan yang paling mendasar.

Permasalahan yang ada diantaranya berupa masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan yang tidak menyeluruh dan masalah keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi lainnya. Tercapainya tujuan pembangunan yang tercermin pada indeks pembangunan manusia sangat tergantung pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang (Marisca dan Haryadi, 2016). Indeks pembangunan manusia digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia berdasarkan komponen dasar kualitas hidup. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar sebagai ukuran kualitas hidup yaitu kesehatan, pengetahuan dan hidup layak.

Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka umur harapan hidup untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Dan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*) (BPS, 2012 dalam Winarti, 2014). Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu indeks komposit yang juga sebagai indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representative.

IPM dicetuskan pertama kali pada periode 1990 oleh UNDP (*United Nations Development Programme*). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi kehidupan manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut yaitu, pertama peluang hidup (*longevity*), kedua pengetahuan (*knowledge*) dan ketiga

hidup layak (*longevity*), kedua pengetahuan (*knowledge*) dan ketiga hidup layak (*living standards*).

Pada tahun 2010 UNDP (*United Nations Development Programme*) dalam laporannya *Global Human Development Report* (GHDR) memperkenalkan konsep Pembangunan Manusia (*Human Development*) sebagai paradigma baru model pembangunan manusia. Menurut UNDP pembangunan manusia merupakan sebagai perluasan pilihan bagi manusia (*enlarging people's choices*) yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah perluasan pilihan dan juga sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan dan keterampilan dengan sekaligus sebagai pemanfaatan kemampuan atau keterampilan.

5. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu konstruksi pengukuran atas dasar konsep *right based approach to human development*. IPM melakukan pengukuran rata-rata pencapaian setiap individu negara yang menyangkut tiga dimensi dasar dari proses pengembangan kualitas manusia. Pengukuran ini dilakukan dengan menetapkan beberapa asumsi dasar bahwa manusia yang berkualitas adalah sebagai berikut :

- a. Manusia yang dapat hidup sehat dan panjang umur, sebagaimana diukur dengan Angka Harapan Hidup sejak waktu lahir.
- b. Manusia yang memiliki kecakapan dan pendidikan yang diperlukan bagi hidupnya, sebagaimana diukur melalui indikator

angka literasi orang dewasa (*adult literacy rate*) dengan bobot penilaian dua pertiga, serta indikator kombinasi Angka Partisipasi Kasar pendidikan dasar, menengah dan tinggi dengan bobot penilaian satu pertiga dari penghitungan indeks pendidikan.

- c. Manusia yang dapat mencapai standar hidup layak, sebagaimana diukur dengan logaritma pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita yang menggunakan indikator *purchasing power parity* (PPP) yang dihitung dalam dolar Amerika.

Berikut merupakan rumus untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai berikut :

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks X (1)} + \text{Indeks X (2)} + \text{Indeks X (3)} \dots\dots\dots)$$

Dimana :

X (1) : Indeks harapan hidup

X (2) : Indeks pendidikan = $2/3$ (indeks melek huruf) + $1/3$ (indeks rata rata lama sekolah)

X (3) : Indeks standar hidup layak

Terlebih dahulu Masing-masing komponen tersebut dihitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan dalam analisa biasanya indeks ini dikalikan 100. Teknik penyusunan indeks tersebut pada dasarnya mengikuti rumus sebagai berikut :

$$\text{Indeks X (i)} = (\text{X(i)} - \text{X(i) min}) / (\text{X(i) maks} - \text{X(i) min})$$

Dimana :

X (i) : Indikator ke-i (i = 1,2,3)

$X(i)$: Nilai maksimum $X(i)$

$X(i)$: Nilai minimum $X(i)$

6. Konsep Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen fiskal yang berperan dalam proses pengendalian inflasi, pengangguran, depresi, neraca pembayaran serta stabilitas nilai tukar (Muritala, 2011 : 4). Kebijakan pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang mencerminkan salah satu wujud intervensi pemerintah untuk mengatasi market failure dalam suatu perekonomian (Kemenkeu, 2011).

Menurut Rostow dalam Jhingan (2013), mengatakan bahwa yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap pertama atau awal adalah tahap perkembangan. Rasio pengeluaran terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal ini dikarenakan pada tahap ini pemerintah hanya menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi investasi pemerintah harus tetap diperlukan untuk dapat memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Sedangkan wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional.

Menurut Sodano Sukirno (2013) pengeluaran pemerintah adalah keseluruhan pengeluaran yang dilakukan yaitu pengeluaran yang meliputi konsumsi dan investasi. Sedangkan menurut Hera Susanti (2010), pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak.

Wagner menambah hukum aktivitas pemerintah yang selalu meningkat. Musgrave (2015) mengatakan hukum pengeluaran pemerintah didefinisikan dalam pengertian peningkatan porsi pemerintah. Dimana perubahan harga dalam menentukan besarnya pengeluaran pemerintah di pengaruhi oleh produktivitas yang berimbas pada pendapatan per kapita. Keterlibatan pemerintah berkaitan erat dalam pembangunan sumber daya manusia sehingga dapat mengatur alokasi sumber daya secara komprehensif di setiap wilayah yang tertampung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan PERMENDAGRI No. 16 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2013 mengatakan bahwa belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah 25 Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah diklasifikasikan adalah sebagai berikut :

- a. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak dianggarkan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi seperti Belanja pegawai, Belanja bunga, Belanja subsidi, Belanja hibah dan Bantuan sosial, belanja bagi hasil, Belanja bantuan keuangan dan Belanja tidak terduga.
- b. Belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan kegiatan operasional dan pelaksanaan program oleh pemerintah. Belanja langsung meliputi seperti alokasi belanja yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, Belanja pegawai, Belanja Modal, Belanja barang dan jasa.

7. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Menurut Covey (2012) dalam Santoso (2013), bahwa dalam menciptakan manusia yang produktif, kesehatan merupakan hal atau bagian dari kehidupan yang harus selalu dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. Agar kualitas kesehatan masyarakat tetap terjamin pemerintah perlu untuk mengalokasikan sejumlah dana untuk berbagai keperluan dan hal di bidang kesehatan seperti tenaga medis, obat-obatan, puskesmas dan rumah sakit.

Kesehatan merupakan dasar dari produktivitas kerja dan kapasitas belajar di sekolah baik pada tingkat individual maupun keluarga. Tenaga kerja akan lebih produktif dalam bekerja ketika mereka sehat secara fisik dan mental dibandingkan mereka yang kurang sehat. Keadaan seperti ini sering terjadi pada negara-negara sedang berkembang, dimana proporsi terbesar dari angkatan kerja masih melakukan pekerjaannya secara manual.

Kesehatan tidak hanya merupakan hak warga tetapi juga merupakan barang investasi yang menentukan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi negara atau suatu daerah. Sehingga ada kebutuhan untuk melembagakan pelayanan kesehatan universal. Ada dua isu mendasar untuk mewujudkan tujuan pelayanan kesehatan dengan cukup secara universal, yaitu bagaimana cara membiayai pelayanan kesehatan untuk bagi masyarakat. Dan bagaimana mengalokasikan dana kesehatan untuk menyediakan pelayanan kesehatan dengan efektif dan adil bagi masyarakat (Bisma Murti, 2010).

Menurut Undang-Undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan terdapat Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Pasal 171 ayat 2 mengatakan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 % dari APBD di luar gaji. Sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah, provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 % dari APBD di luar gaji. Dari beberapa mengenai pembiayaan pelayanan kesehatan, terlihat bahwa biaya kesehatan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yaitu :

- a. Penyedia pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah besarnya dana yang harus disediakan oleh pemerintah untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan. Dengan maksud seperti bahwa kesehatan dari sudut penyedia pelayanan adalah persoalan utama pemerintah dan atau pihak dari swasta.
- b. Pemakai jasa pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk bisa dimanfaatkan jasa pelayanan tersebut. Berbeda dengan pengertian biaya kesehatan menjadi persoalan utama para pemakai jasa pelayanan. Dengan batas-batas tertentu pemerintah harus turut tangan mempersoalkannya, yakni dalam rangka terjaminnya pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang akan merasakannya dampak dari pelayanan tersebut.

Salah satu sistem kesehatan nasional adalah sistem pembiayaan kesehatan. Jika ditinjau dari sudut definisi kesehatan, sebagaimana yang dimaksud pihak WHO. Maka pembiayaan pembangunan perumahan dan pembiayaan pengadaan pangan yang karena juga memiliki dampak terhadap derajat kesehatan. Kesehatan

adalah unsur vital dan merupakan elemen konstitutif dalam proses kehidupan seseorang tanpa adanya kesehatan yang baik dan bugar maka tidak akan masyarakat menjadi produktif. Dalam kehidupan manusia, pembangunan kesehatan merupakan suatu hal yang bernilai sangat insentif.

8. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Dalam peningkatan sumber daya manusia pendidikan mempunyai peranan penting. Pertumbuhan ekonomi bangsa dipengaruhi secara penuh oleh pendidikan. Pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas dan fertilitas (angka kelahiran) masyarakat. Dengan pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dalam kehidupan.

Pada umumnya pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia. Pendidikan memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan kehidupan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap serta produktivitas. Dalam hubungannya dengan biaya dan manfaat, pendidikan dapat dipandang sebagai salah satu investasi (*human investment*) dalam hal ini, proses pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata, akan tetapi merupakan suatu investasi.

Investasi sumberdaya manusia yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat dari adanya pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Dengan adanya bantuan dari pemerintah semua masyarakat bisa memperoleh pendidikan yang layak terutama bagi

masyarakat miskin. Investasi ini memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan.

Pendidikan merupakan ilmu pengetahuan, keterampilan, pelatihan maupun itu sebuah bimbingan yang diberikan baik individu serta kelompok agar menjadi sosok yang mendapatkan hasil suatu kreativitas maupun sebuah inovasi yang bermanfaat dan berguna pada diri manusia. Pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan, menurut Todaro (2012 : 434) menyebutkan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang paling mendasar. Pendidikan adalah hal yang paling untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga juga, sehingga merupakan hal fundamental untuk membentuk suatu kemampuan manusia itu sendiri dan yang lebih luas pada inti sebuah pembangunan.

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya pada jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya dengan baik sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Maka dari itu semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi masyarakat dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan (Meier, dalam Winarti, 2014 : 41).

Menurut Michael P. Todaro (2013) mengatakan bahwa ada dua macam tentang biaya pendidikan yaitu sebagai berikut :

a. Biaya pendidikan individual

Biaya pendidikan langsung individual adalah segenap biaya atau uang yang harus ditanggung oleh siswa dan keluarga yang membiayai dalam pendidikannya.

b. Biaya pendidikan tidak langsung

Biaya pendidikan tidak langsung adalah biaya yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai bantuan uang untuk membiayai sekolah kepada para siswa.

Menurut Pasal 1 butir 40 Undang-Undang No. 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas dasar UU No. 22 Tahun 2011 Tentang ABPN 2012, mengatakan bahwa anggaran dalam sektor pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi dalam pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga. Alokasi anggaran pendidikan melalui transfer kedaerah dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan termasuk gaji pendidik tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan. Untuk ingin membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab oleh pemerintah.

Ketersediaan fasilitas pelayanan baik fisik maupun non fisik sangat mempengaruhi perkembangan pendidikan di suatu daerah, dalam bidang fisik seperti ketersediaan sarana standart dalam pembangunan gedung pendidikan maupun sarana laboratorium, juga bidang non fisik seperti besar adanya bantuan biaya pendidikan. Pemerintah harus lebih fokus terhadap pendidikan sebagai faktor penting dalam meningkatkan pembangunan nasional. Jika halnya terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah dari sektor pendidikan. Pemerintah menyediakan anggaran minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) untuk bidang pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 bahwa mengatakan dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian sebelumnya pada tabel berikut :

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisa	Hasil
1.	Naylal Fithri, David Kaluge (2017) Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur.	Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan	Menggunakan Model Regresi Data Panel	Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.
2.	Intan Safitri (2016) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh.	Pengeluaran Sektor Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur, dan IPM	Menggunakan analisis <i>Random Effect Model</i> (REM)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur memiliki pengaruh positif terhadap IPM dengan tingkat signifikansi yang berbeda-beda. Adapun pengeluaran pemerintah yang signifikan terhadap IPM adalah pengeluaran sektor kesehatan, sedangkan pengeluaran sektor pendidikan dan infrastruktur tidak berpengaruh signifikan. Pemerintah

				kabupaten/kota diharapkan dapat melakukan kebijakan-kebijakan sehingga pengeluaran dapat menjadi signifikan terhadap IPM dengan melakukan pengeluaran secara merata.
3.	<p>Septian Anhar Lubis (2009)</p> <p>Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan.</p>	Investasi, Jumlah Penduduk, Pengeluaran pemerintah	Menggunakan analisis <i>Ordinary Least Squared</i> (OLS)	Menunjukkan bahwa variabel investasi, variabel jumlah penduduk dan variabel pengeluaran pemerintah masing-masing mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kota medan dan signifikan secara statistik pada $\alpha = 5\%$.
4.	<p>Bilal A. Wahid (2012)</p> <p>Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Makassar Periode 1996-2010.</p>	Sektor pendidikan, sektor kesehatan, belanja rutin, PDRB, IPM	Menggunakan metode analisis <i>two stage least square</i> (TSLS)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB, dan belanja tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM baik secara langsung maupun pengaruh total. Kedua, belanja pemerintah bidang kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB, dan belanja tersebut berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM baik secara langsung maupun pengaruh total. Ketiga, Belanja pemerintah lainnya dalam hal ini belanja pegawai rutin berpengaruh positif dan tidak signifikan

				terhadap PDRB, dan belanja tersebut berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM baik secara langsung maupun pengaruh total. Serta PDRB yang berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM.
5.	<p>Muliza T. Zulham Chenny Seftarita (2017)</p> <p>Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat kemiskinan dan PDRB terhadap IPM di Provinsi Aceh.</p>	IPM, Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Kemiskinan, PDRB	Menggunakan analisis <i>Random Effect Model</i> (REM)	<p>Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah disektor pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, hal ini terjadi karena pemerintah kabupaten/kota masih lebih dominan mengalokasikan belanjanya yang pada jenis belanja yang secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap IPM. Sedangkan variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, maka dengan menurunnya tingkat kemiskinan dapat meningkatkan IPM. PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, yang berarti PDRB meningkat maka IPM juga akan meningkat.</p>

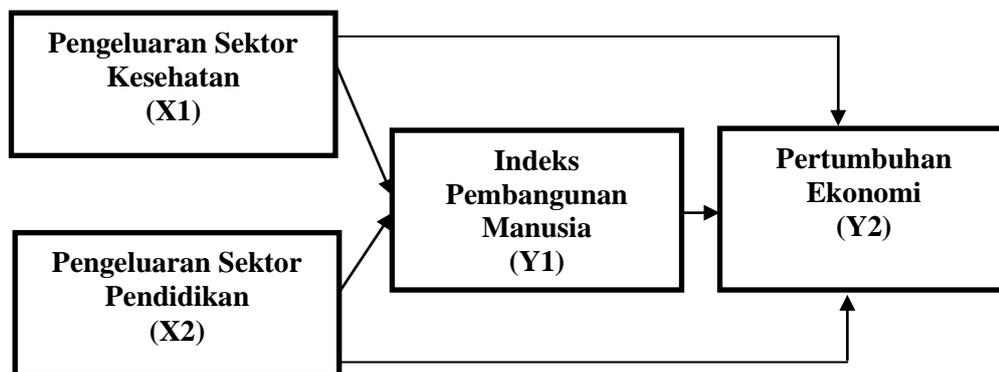
6.	<p>Septiana M.M. Sanggelorang, Vekie A. Rumate, Hanly F.DJ. Siwu (2015)</p> <p>Pengaruh pengeluaran Pemerintah disektor Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara.</p>	Pendidikan, Kesehatan, IPM	Menggunakan analisis Regresi Linier Berganda	<p>Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif, yaitu meningkat sebesar 0,870 dan secara statistik signifikan terhadap IPM. Dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh negatif, yaitu sebesar -0,438 dan secara statistik tidak berpengaruh terhadap IPM di Sulawesi Utara.</p>
7.	<p>Nur Aidar, Muhajir (2014)</p> <p>Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Pendapatan Per Kapita Di Provinsi Aceh.</p>	Kesehatan, Pendidikan, Pendapatan Per Kapita	Menggunakan analisis <i>Random Effect Model</i> (REM)	<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan secara statistik tidak signifikan terhadap pendapatan per kapita, meskipun mereka memiliki hubungan positif. Sementara itu, belanja pendidikan secara statistik berdampak positif terhadap pendapatan per kapita di seluruh kabupaten di Aceh.</p>
8.	<p>Nur Azizah (2016)</p> <p>Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap IPM Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Beberapa Kabupaten Pesisir Provinsi Sulawesi Selatan.</p>	IPM, pengeluaran pemerintah urusan pendidikan, pengelura pemerintah urusan kesehatan, pengeluaran pemerintah urusan ekonomi, pertumbuhan ekonomi	Menggunakan metode Path Analysis (Analisis Jalur)	<p>Hasil ini menunjukkan bahwa secara langsung pengeluaran pemerintah urusan pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah urusan kesehatan secara</p>

				<p>langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah urusan ekonomi secara langsung berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Secara tidak langsung pengaruh pengeluaran pemerintah urusan pendidikan, kesehatan dan ekonomi secara bersama-sama terhadap indeks pembangunan manusia melalui variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan.</p>
9.	<p>Mahyuni (2013)</p> <p>Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Selatan Periode 2000-2010.</p>	<p>Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta, Ekspor, Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>Menggunakan analisis <i>Ordinary Least Square</i> (OLS)</p>	<p>Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah, investasi swasta dan ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.</p>
10.	<p>Asya Yandi Dea Kristina (2017)</p> <p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (38 Kabupaten/Kota di</p>	<p>PDRB, PAD, IPM, tenaga kerja</p>	<p>Menggunakan Regresi Linier Berganda</p>	<p>Hasil penelitian ini dengan model yang terpilih <i>Fixed Effect Model</i> menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 38.25679, IPM berpengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien</p>

	Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2016).		sebesar -514690.0, tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 26.10263. sedangkan nilai koefisien determinasi (R ²) adalah 0.99 atau 99%., ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel pendapatan asli daerah, IPM, dan tenaga kerja dalam menjelaskan produk domestik regional bruto adalah sebesar 99%.
--	---------------------------------------	--	--

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, landasan teori dan review penelitian terdahulu sebagaimana telah dikemukakan maka hubungan antar variabel dapat digambarkan melalui model kerangka konsep penelitian pada gambar 2.1 berikut ini :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Dalam gambar di atas menunjukkan variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan sektor pendidikan serta variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia menjadi variabel

intervening dalam penelitian ini. Variabel independen ini diprediksi akan mempengaruhi variabel dependen dalam arti peningkatan dan penurunan yaitu pengeluaran pemerintah sektor kesehatan maupun sektor pendidikan akan menaikkan atau menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Maka dari itu terdapat teori yang mendukung pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Covey (1990) dalam Santoso (2013), bahwa dalam menciptakan manusia yang produktif, kesehatan merupakan hal atau bagian dari kehidupan yang harus selalu dijaga dan ditingkatkan kualitasnya.
2. Pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan, menurut Todaro (2008 : 434) menyebutkan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang paling mendasar. Pendidikan adalah hal yang paling untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga juga, sehingga merupakan hal fundamental untuk membentuk suatu kemampuan manusia itu sendiri dan yang lebih luas pada inti sebuah pembangunan.
3. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai dari seberapa besar permasalahan yang dapat diatasi terlebih lagi permasalahan yang paling mendasar. Permasalahan yang ada diantaranya berupa masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan yang tidak menyeluruh dan masalah keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi lainnya. Tercapainya tujuan pembangunan yang tercermin pada indeks

pembangunan manusia sangat tergantung pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang (Marisca dan Haryadi, 2016).

4. Menurut Prof. Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang menjadi objek penelitian dimana kebenarannya masih perlu dikaji dan diteliti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan perumusan diatas, maka penulis membuat hipotesisnya yaitu :

1. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
2. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
3. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
4. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
5. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Indeks Pembangunan Manusia.

6. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Indeks Pembangunan Manusia.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Dan untuk variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan.

B. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
1	Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X1)	Besarnya pengeluaran pemerintah yang disusun dalam APBD sektor kesehatan untuk membiayai pembangunan dalam sektor kesehatan	1.Sumber Daya Manusia (SDM) 2.Belanja Modal
2	Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X2)	Besarnya pengeluaran pemerintah yang disusun dalam APBD sektor pendidikan untuk membiayai pembangunan dalam sektor pendidikan	1.Sumber Daya Manusia (SDM) 2.Belanja Modal
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Y1)	Indikator capaian pembangunan sumber daya manusia secara menyeluruh yang dibentuk dalam tiga aspek seperti kesehatan, pendidikan dan hidup layak	1.Angka harapan hidup ketika lahir 2.Rata-rata lama sekolah (melek huruf diatas 15

			tahun) 3. Hidup Layak (daya beli)
4	Pertumbuhan Ekonomi (Y2)	Jumlah unit tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dan dihitung secara berkala berdasarkan harga konstan dalam persen	1. tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Medan. Waktu penelitian ini di mulai dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019. Untuk lebih jelasnya seperti dirincikan pada tabel berikut:

Tabel. 3.1 Jadwal Penelitian

No.	Aktivitas	Bulan/Tahun				
		Agts 19	Sept 19	Okt 19	Nov 19	Des 19
1	Riset awal/pengajuan judul	■				
2	Penyusunan proposal		■			
3	Seminar proposal			■		
4	Perbaikan / acc proposal				■	
5	Pengolahan data				■	
6	Penyusunan skripsi				■	
7	Bimbingan skripsi				■	
8	Meja hijau					■

Sumber : Disusun Peneliti 2019

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dengan runtun waktu (*time series*). Data sekunder adalah yang diperoleh para peneliti melalui banyak mencari sumber yang sebelumnya sudah ada atau data yang langsung. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data BPS (Badan Pusat Statistik) mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2017 (8 tahun).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dan mengolah data dari informasi terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data diperoleh pada tahun 2010 sampai dengan 2017.

F. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Path Analysis (analisis jalur). Analisis jalur bertujuan untuk membuktikan hipotesis, yaitu membuktikan apakah pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan sektor pendidikan menjadi variabel utama dalam mendukung dari pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia menjadi variabel intervening, dengan persamaan sebagai berikut :

1. Persamaan Pertama

$$Y_1 = \beta_{Y_1 X_1} X_1 + \beta_{Y_1 X_2} X_2 + \epsilon_1$$

2. Persamaan Kedua

$$Y_2 = \beta_{Y_2 X_1} X_1 + \beta_{Y_2 X_2} X_2 + \beta_{Y_2 Y_1} Y_1 + \epsilon_2$$

Persamaan Aplikasi

1. Persamaan 1 $Y_2 = \beta_{Y_2X_1} X_1 + \beta_{Y_2Y_1} Y_1 + e$
2. Persamaan 2 $Y_2 = \beta_{Y_2X_2} X_2 + \beta_{Y_2Y_1} Y_1 + e$
3. Persamaan 3 $Y_1 = \beta_{Y_1X_1} X_1 + e$
4. Persamaan 4 $Y_1 = \beta_{Y_1X_2} X_2 + e$

Keterangan :

- Y1 = Indeks Pembangunan Manusia
- Y2 = Pertumbuhan Ekonomi
- X1 = Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan
- X2 = Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan
- ϵ = *Error Term* / Tingkat Kesalahan

Analisis Jalur (Path Analysis) didukung oleh uji mediasi. Uji Mediasi bertujuan untuk menguji apakah variabel intervening berfungsi sebagai mediasi atau perantara. Dengan syarat :

$P_1 < P_2 \times P_3$ atau pengaruh langsung < pengaruh tidak langsung maka H_a diterima

$P_1 > P_2 \times P_3$, atau pengaruh langsung > pengaruh tidak langsung maka H_a ditolak

Untuk mengetahui kelayakan model analisis jalur, maka akan dilakukan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah hasil estimasi jalur yang dilakukan benar-benar layak digunakan atau tidak. Uji asumsi klasik yang digunakan, yaitu :

1. Uji Normalitas Data

Uji Normalitas Data adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini pengujian Normalitas Data dideteksi melalui analisa grafik histogram dan normal P-P Plot yang dihasilkan dari Aplikasi SPSS.

2. Uji Multikolinieritas Data

Uji multikolinieritas Data adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih. Dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Data yang baik jika terbebas dari masalah Multikolinieritas Data

3. Uji Autokorelasi Data

Uji Autokorelasi Data adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Dalam penelitian ini pengujiannya melalui dengan syarat 1-3, jika nilai D melebihi dari 1-3 maka data dinyatakan lulus dari Uji Autokorelasi Data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kota Medan

Zaman dahulu kala kota Medan dikenal sebagai Tanah Deli dan keadaan tanah berawa-rawa yang kurang lebih dari 4000 ha. Beberapa sungai melintasi kota Medan ini semuanya bermuara ke Selat Malaka. Sungai-sungai itu yaitu sei Deli, Sei Babura, Sei Sikambing, Sei Denai, Sei Putih, Sei Badra, Sei Belawan, Sei Sulang-saling/sei Kera. Pada awalnya yang membuka perkampungan Medan adalah Guru Patimpus. Patimpus adalah anak dari Tuan Si Raja Hita, pemimpin Karo yang tinggal dikampung Pekan. Kemudian Tuan Si Raja Hita menolak menggantikan ayahnya dan lebih tertarik pada ilmu pengetahuan dan mistik, sehingga dikenal sebagai Guru Patimpus sejak tahun 1614-1630 M, dan dia belajar agama islam dan di islamkan oleh Datuk.

Selanjutnya Guru Patimpus menikah dengan adik Tarigan, pimpinan daerah yang sekarang bernama Pulau Brayon dan membuka Desa Medan yang terletak di antara Sungai Babura dan Sungai Deli. Oleh karena itu, nama Guru Patimpus saat ini diabadikan sebagai nama jalan utama di daerah kota Medan. Sejak zaman penjajahan, masyarakat selalu merangkaikan Medan dengan Deli, tetapi setelah zaman kemerdekaan lama kelamaan istilah Medan berangsur-angsur hilang. Terdapat berbagai sumber literatur mengenai asal-usul kata Medan itu sendiri, diantaranya dari catatan penulis-penulis Portugis yang asalnya dari awal abad ke-16 disebutkan bahwa Medan berasal dari nama "Medin". Medan pertama kali

ditempati oleh orang-orang suku Batak, Karo, hanya setelah penguasa aceh yang bernama Sultan Iskandar Muda mengirim panglimanya yang bernama Gocah Pahlawan bergelar Laksamana Khoja Bintan untuk dijadikan wakil kerajaan Aceh di Tanah Deli, maka kerajaan Deli mulai berkembang. Perkembangan ini ikut mendorong pertumbuhan dari segi penduduk maupun kebudayaan di Medan. Dimasa pemerintahan sultan deli kedua, Tuanku Panglima Parunggit (masa pemerintahan dari tahun 1669-1698) terjadi sebuah perang kavaleri di Kota Medan. Sejak saat itu, Medan menjadi pembayar upeti kepada Sultan Deli. Medan tidak mengalami perkembangan pesat hingga tahun 1860-an, ketika penguasa-penguasa dari Belanda mulai membebaskan tanah untuk perkebunan tembakau.

Dahulu orang menamakan Tanah Deli mulai dari sungai ular (Deli Serdang) sampai ke sungai Wampu di Langkat sedangkan kesultanan Deli yang berkuasa saat itu wilayah kekuasannya tidak mencakup daerah di antara kedua sungai tersebut. Kediaman Sultan Deli disebut Kotamatsum dan pusat pemerintahan Kesultanan Deli disebut kota Maimun.

Bulan Maret 1864, Nienhuys yang merupakan pedagang tembakau asal Belanda, mengirim contoh tembakau hasil kebunnya ke Rotterdam, Belanda untuk diuji kualitasnya. Ternyata, daun tembakau itu dianggap berkualitas tinggi untuk bahan pembalut cerutu. Perjanjian tembakau ditandatangani oleh Belanda bersama Sultan Deli pada tahun 1865. Pada tahun 1869, Nienhuys memindahkan kantor pusat Deli Mij di Labuhan. Dengan perpindahan kantor tersebut, Medan dengan cepat menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan perdagangan, sekaligus menjadi daerah yang paling mendominasi perkembangan di Indonesia bagian barat. Pesatnya perkembangan perekonomian mengubah Deli menjadi pusat

perdagangan yang mahsyur dengan julukan *het dollar land* atau tanah uang. Perkembangan Medan menjadi pusat perdagangan, telah mendorongnya menjadi pusat pemerintahan. Pada tahun 1879, Ibu Kota Asisten Residen Deli dipindahkan dari Labuhan ke Medan, 1 Maret 1887, Ibu Kota Residen Sumatra Timur dipindahkan pula dari Bengkalis ke Medan, Istana Kesultanan Deli yang semula berada dikampung Bahari (Labuhan) juga pindah dengan selesainya pembangunan Istana Maimoon pada tanggal 18 Mei 1891 dan dengan demikian Ibu Kota Deli telah resmi pindah ke Medan. Medan sebagai embrio sebuah kota secara kronologis berawal dari peristiwa penting tahun 1918, yaitu pada saat Medan menjadi Gemeente (kota administratif), akan tetapi tanpa memiliki Wali Kota sehingga wilayah tersebut tetap dibawah kewenangan penguasa Hindia Belanda. Kota administratif Medan dibentuk melalui lembaga bernama “komisi pengelola dana kotamadya”, yang dikenal dengan sebutan Negorijraad. Berdasarkan “Desentralisatie Wet Stbl 1903 No 329”, lembaga lain dibentuk yaitu “Afdeelingsraad Van Deli” yang berjalan bersama Negorijraad sampai dihapuskan “Afdeelingsraad Van Deli” yang berjalan bersama Negorijraad sampai dihapuskan Kota Medan. Maka, tanggal 1 April 1909 ini sempat dijadikan tanggal lahir kota Medan sampai dengan tahun 1975. Pimpinan Medan Municipal Board saat didirikan tanggal 1 April 1909 adalah Mr. EP Th Maier yang menjabat sebagai pembantu Residen Deli Serdang. Namun sejak 26 Maret 1975, lewat keputusan DPRD NO.4/DPRD/1975 yang didasari banyak pertimbangan, ditetapkan bahwa hari lahir Kota Medan adalah 1 Juli 1909.

2. Letak geografis

Kota Medan terletak antara $2^{\circ}.27'-2^{\circ}.47'$ Lintang Utara dan $98^{\circ}.35'-98^{\circ}.44'$ Bujur Timur. Kota Medan 2,5-3,75 meter di atas permukaan laut. Kota Medan mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum berkisar antara $23,0^{\circ}\text{C}$ - $24,1^{\circ}\text{C}$ dan suhu maksimum berkisar antara $30,6^{\circ}\text{C}$ - $33,1^{\circ}\text{C}$ serta pada malam hari berkisar 26°C - $30,8^{\circ}\text{C}$. Selanjutnya mengenai kelembaban udara di wilayah Kota Medan rata-rata 78%-82%. Sebagian wilayah di Kota Medan sangat dekat dengan wilayah laut yaitu pantai Barat Belawan dan daerah pedalaman yang tergolong dataran tinggi, seperti Kabupaten Karo. Akibatnya suhu di Kota Medan menjadi tergolong panas. Kecepatan angin rata-rata sebesar 0,42 m/sec sedangkan rata-rata total laju penguapan tiap bulannya 100,6 mm.

Kota Medan memiliki luas 26.510 hektar ($265,10\text{ km}^2$) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lainnya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Secara geografis kota Medan terletak pada $3^{\circ} 30'-3^{\circ} 43'$ Lintang Utara dan $98^{\circ} 35'-98^{\circ} 44'$ Bujur Timur. Untuk itu topografi Kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5-37,5 meter di atas permukaan laut. Sesuai dengan dinamika pembangunan kota, luas wilayah administrasi Kota Medan telah melalui beberapa kali perkembangan. Pada Tahun 1951, Walikota Medan mengeluarkan Maklumat Nomor 21 tanggal 29 September 1951, yang menetapkan luas Kota Medan menjadi 5.130 Ha, meliputi 4 Kecamatan dengan 59 Kelurahan. Maklumat Walikota Medan dikeluarkan menyusul keluarnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66/III/PSU tanggal 21 September 1951, agar daerah Kota Medan diperluas menjadi tiga kali

lipat. Sesuai dengan dinamika pembangunan kota, luas wilayah administrasi Kota Medan telah melalui beberapa kali perkembangan. Pada Tahun 1951, Walikota Medan mengeluarkan Maklumat Nomor 21 tanggal 29 September 1951, yang menetapkan luas Kota Medan menjadi 5.130 Ha, meliputi 4 Kecamatan dengan 59 Kelurahan. Maklumat Walikota Medan dikeluarkan menyusul keluarnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66/III/PSU tanggal 21 September 1951, agar daerah Kota Medan diperluas menjadi tiga kali lipat. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1973 Kota Medan kemudian mengalami pemekaran wilayah menjadi 26.510 Ha yang terdiri dari 11 Kecamatan dengan 116 Kelurahan.

Berdasarkan luas administrasi yang sama maka melalui Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2271/PUOD, tanggal 5 Mei 1986, Kota Medan melakukan pemekaran Kelurahan menjadi 144 Kelurahan. Perkembangan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Nomor 140.22/2772.K/1996 tanggal 30 September 1996 tentang pendefitipan 7 Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1992 tentang Pembentukan Beberapa Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, secara administrasi Kota Medan dimekarkan kembali, dibagi atas 21 Kecamatan yang mencakup 151 Kelurahan, yakni :

- a. Medan Tuntungan dengan 9 Kelurahan
- b. Medan Johor dengan 6 Kelurahan
- c. Medan Amplas dengan 8 Kelurahan
- d. Medan Denai dengan 5 Kelurahan

- e. Medan Area dengan 12 Kelurahan
- f. Medan Kota dengan 12 Kelurahan
- g. Medan Maimun dengan 6 Kelurahan
- h. Medan Polonia dengan 5 Kelurahan
- i. Medan Baru dengan 6 Kelurahan
- j. Medan Selayang dengan 6 Kelurahan
- k. Medan Sunggal dengan 6 Kelurahan
- l. Medan Helvetia dengan 7 Kelurahan
- m. Medan Petisah dengan 7 Kelurahan
- n. Medan Barat dengan 6 Kelurahan
- o. Medan Timur dengan 11 Kelurahan
- p. Medan Perjuangan dengan 9 Kelurahan
- q. Medan Tembung dengan 7 Kelurahan
- r. Medan Deli dengan 6 Kelurahan
- s. Medan Labuhan dengan 7 Kelurahan
- t. Medan Marelan dengan 4 Kelurahan
- u. Medan Belawan dengan 6 Kelurahan

Tabel 4.1
Batas wilayah Kota Medan

Utara	Selat malaka
Selatan	Pancur Batu, Deli Tua (Kabupaten Deli Serdang)
Barat	Tanjung Morawa (Kabupaten Deli Serdang)
Timur	Kota Binjai, Hampan Perak (Kabupaten Deli Serdang)

3. Kondisi Alam dan Penduduk Kota Medan

Penduduk Kota Medan memiliki ciri penting yaitu yang meliputi unsur agama, suku etnis, budaya dan keragaman (plural) adat istiadat. Hal ini memunculkan karakter sebagian besar penduduk Kota Medan bersifat terbuka. Secara Demografi, Kota Medan pada saat ini juga sedang mengalami masa transisi demografi. Kondisi tersebut menunjukkan proses pergeseran dari suatu keadaan dimana tingkat kelahiran dan kematian tinggi menuju keadaan dimana tingkat kelahiran dan kematian semakin menurun. Berbagai faktor yang mempengaruhi proses penurunan tingkat kelahiran adalah perubahan pola fikir masyarakat dan perubahan sosial ekonominya. Di sisi lain adanya faktor perbaikan gizi, kesehatan yang memadai juga mempengaruhi tingkat kematian.

Koordinat geografis Kota Medan $3^{\circ} 30'-3^{\circ} 43'$ LU dan $98^{\circ} 35'-98^{\circ} 44'$ BT. Permukaan tanahnya cenderung miring ke Utara dan berada pada ketinggian 2,5-37,5 m di atas permukaan laut. Secara umum ada 3 faktor utama yang mempengaruhi kinerja pembangunan kota, sebagai berikut :

- a. faktor geografis
- b. faktor demografis
- c. faktor sosial ekonomi

Ketiga faktor tersebut biasanya terkait satu dengan lainnya, yang secara simultan mempengaruhi daya guna dan hasil guna pembangunan kota termasuk pilihan-pilihan penanaman modal (investasi).

Sesuai dengan dinamika pembangunan kota, luas wilayah administrasi Kota Medan telah melalui beberapa kali perkembangan. Pada Tahun 1951, Walikota Medan mengeluarkan Maklumat Nomor 21 tanggal 29 September 1951, yang

menetapkan luas Kota Medan menjadi 5.130 Ha, meliputi 4 Kecamatan dengan 59 Kelurahan. Maklumat Walikota Medan dikeluarkan menyusul keluarnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66/III/PSU tanggal 21 September 1951, agar daerah Kota Medan diperluas menjadi tiga kali lipat. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1973 Kota Medan kemudian mengalami pemekaran wilayah menjadi 26.510 Ha yang terdiri dari 11 Kecamatan dengan 116 Kelurahan.

Berdasarkan luas administrasi yang sama maka melalui Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2271/PUOD, tanggal 5 Mei 1986, Kota Medan melakukan pemekaran Kelurahan menjadi 144 Kelurahan. Perkembangan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Nomor 140.22/2772.K/1996 tanggal 30 September 1996 tentang penetapan 7 Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1992 tentang Pembentukan Beberapa Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, secara administrasi Kota Medan dimekarkan kembali, dibagi atas 21 Kecamatan yang mencakup 151 Kelurahan. Berdasarkan perkembangan administratif ini Kota Medan kemudian tumbuh secara geografis, demografis dan sosial ekonomis.

Secara administratif, wilayah Kota Medan hampir secara keseluruhan berbatasan dengan Daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebelah Barat, Selatan dan Timur. Sepanjang wilayah Utara nya berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yang diketahui merupakan salah satu jalur lalu lintas terpadat di dunia. Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan Sumber Daya alam (SDA), Khususnya di bidang perkebunan dan kehutanan.

Karenanya secara geografis Kota Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya Sumber daya alam seperti Deli Serdang, Labuhan Batu, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, Binjai dan lain-lain.

Kondisi ini menjadikan kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya. Di samping itu sebagai daerah yang pada pinggiran jalur pelayaran Selat Malaka, maka Kota Medan memiliki posisi strategis sebagai gerbang (pintu masuk) kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun kuar negeri (ekspor-impor). Posisi geografis Kota Medan ini telah mendorong perkembangan kota dalam 2 kutub pertumbuhan secara fisik , yaitu daerah terbangun Belawan dan pusat Kota Medan saat ini.

4. Sarana Prasarana Kota Medan

a. Fasilitas Kesehatan

Dalam meningkatkan fasilitas bidang kesehatan didalam mengatasi masalah kesehatan maka Kota Medan selalu meningkatkan pelayanan dengan berbagai upaya dalam pengadaan sarana dan prasarana kesehatan pada tahun 2010 sampai tahun 2017 diantaranya yaitu, rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas, posyandu, klinik/balai kesehatan, pustu (pusat kesehatan masyarakat pembantu).

Tabel 4.2
Jumlah Fasilitas Kesehatan

Tahun	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Klinik/Balai Kesehatan	Pustu	Jumlah
2010	76	117	39	1.406	349	41	2.028
2011	75	175	39	1.406	357	41	2.093
2012	77	128	39	1.396	699	41	2.380
2013	78	117	39	1.396	747	41	2.418
2014	79	117	39	1.396	747	41	2.419
2015	79	117	39	1.390	747	41	2.419
2016	79	117	39	1.390	747	41	2.419
2017	79	117	39	1.390	747	41	2.419

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Medan

b. Fasilitas Pendidikan

Tingkat suatu produktivitas dan kompetensi seseorang sangatlah ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil yang diikuti dengan rasa percaya diri seseorang serta sikap dan prilaku yang inovatif. Berdasarkan data pemerintah Kota Medan pada tahun 2010 sampai 2017 jumlah fasilitas bidang pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Jumlah Fasilitas Pendidikan

Tingkat Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
SD	383	472	855
SMP	49	351	400
SMA	21	190	211
SMK	13	147	160

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Medan

B. Gambaran Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia sebagai variabel intervening di Kota Medan. Data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan data Time Series atau rentang waktu mulai dari tahun 2010-2017. Alat pengolah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak (software) computer SPSS 16 dengan metode Path Analysis (Jalur Analisis). Oleh sebab itu, perlu dilihat bagaimana gambaran perkembangan secara umum dari analisis pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia yang terjadi di Kota Medan dari tahun ke tahun.

1. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu pembelanjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah atau

belanja pemerintah harus fokus dengan kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui peningkatan pelayanan publik. Kota Medan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara memiliki pengeluaran pemerintah daerah yang sangat besar jumlahnya. Pengeluaran pemerintah tersebut berupa belanja langsung dan belanja tidak langsung. Adapun total pengeluaran pemerintah daerah Kota Medan mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Total Pengeluaran Pemerintah Kota Medan Tahun 2010-2017
(Dalam Rupiah)

Tahun	Total Pengeluaran Pemerintah
2010	2.582.065.326.653
2011	3.395.728.853.449
2012	4.080.935.662.619
2013	4.237.560.638.891
2014	4.625.169.942.881
2015	5.467.952.757.114
2016	5.737.738.289.895
2017	5.554.084.308.979

Sumber : pengelola keuangan dan aset daerah Kota Medan

Dari data diatas menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah Kota Medan dari tahun 2010 sampai tahun 2017 selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2010 total pengeluaran sebesar Rp. 2.582.065.326.653,00 Pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 5.554.084.308.979,40. Adanya pengeluaran pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Medan agar pengeluaran dananya digunakan pembangunan yang betul-betul membangun untuk masyarakat agar masyarakat merasakannya dalam pembangunan yang ada.

2. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Belanja daerah sektor kesehatan merupakan bagian dari belanja daerah dengan tujuan untuk meningkatkan *Output* dari bidang kesehatan. Tingginya

anggaran sektor kesehatan serta pengelolaan yang tepat sasaran dan efektif maka realisasi belanja daerah bidang kesehatan tentunya akan meningkat dengan baik pula dan bahkan terasa kepada tingkat kesehatan kepada masyarakat. Belanja sektor kesehatan diukur dengan menggunakan realisasi APBD menurut bidang kesehatan dalam satuan rupiah. Adapun total realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Medan sektor kesehatan dari tahun 2010 sampai tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 4.5
Total Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Kota Medan
Tahun 2010-2017 (Dalam Rupiah)

Tahun	Sektor Kesehatan
2010	294.671.898.434
2011	373.568.879.990
2012	423.878.270.895
2013	389.133.311.196
2014	495.610.513.080
2015	627.008.258.405
2016	691.863.259.661
2017	615.211.142.256

Sumber : pengelola keuangan dan aset daerah Kota Medan

3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Belanja daerah sektor pendidikan merupakan bagian dari belanja daerah dengan tujuan untuk meningkatkan *Output* dari bidang pendidikan. Tingginya anggaran sektor pendidikan serta pengelolaan yang tepat sasaran dan efektif maka realisasi belanja daerah bidang pendidikan tentunya akan meningkat dengan baik dan bahkan terasa kepada tingkat pendidikan masyarakat. Belanja sektor pendidikan diukur dengan menggunakan realisasi APBD menurut bidang pendidikan dalam satuan rupiah. Adapun total realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Medan sektor pendidikan dari tahun 2010 sampai tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Total Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Kota Medan
Tahun 2010-2017 (Dalam Rupiah)

Tahun	Sektor Pendidikan
2010	733.266.652.917
2011	983.774.581.356
2012	983.289.538.550
2013	1.109.133.107.469
2014	1.079.853.934.544
2015	1.162.361.929.743
2016	1.195.515.428.591
2017	883.069.743.930

Sumber : pengelola keuangan dan aset daerah Kota Medan

C. Hasil Analisis Data

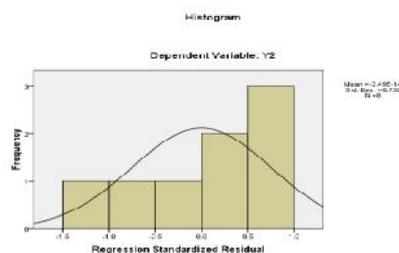
1. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar layak digunakan atau tidak. Data yang diperoleh dari data sekunder secara time series, selanjutnya akan diuji dengan uji asumsi klasik sebagai berikut :

a. Uji Normalitas Data

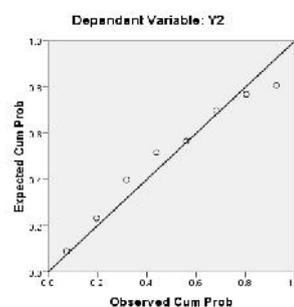
Dalam penelitian ini pengujian normalitas dideteksi melalui analisa grafik histogram dan normal P-P Plot yang dihasilkan SPSS sebagai berikut:

Gambar 4.1
Histogram



Gambar 4.2
P-Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Dari hasil analisis diatas terlihat bahwa grafik histogram menunjukkan kecembungan seimbang ditengah dan grafik PP-Plot menunjukkan titik-titik data berada disekitar garis diagonal maka data dinyatakan berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas Data

Uji Multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Data yang baik jika terbebas dari masalah multikolinieritas. Hasil uji Multikolinieritas sebagai berikut:

Tabel 4. 7
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	116.624	23.115		5.045	.007					
pengeluaran pemerintah sektor kesehatan	.009	.002	1.331	3.768	.020	-.498	.883	.467	.123	8.113
pengeluaran pemerintah sektor pendidikan	.002	.000	.886	6.060	.004	.743	.950	.751	.720	1.390
indeks pembangunan manusia	-1.469	.309	-1.577	4.761	.009	-.598	-.922	.590	.140	7.137

a. Dependent

Variable: Y2

Hasil uji Multikolinieritas diketahui bahwa nilai *tolerance* dan VIF pada tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinieritas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *tolerance* yang besarnya jauh melebihi angka 0,1 dan VIF variabel tersebut yang besarnya kurang dari 10.

c. Uji Autokorelasi Data

Dalam penelitian ini pengujian multikolinieritas dideteksi melalui dengan analisa nilai Durbin Watson yang dihasilkan oleh output SPSS sebagai berikut:

Tabel 4.8
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.969 ^a	.939	.892	.30017	.939	20.352	3	4	.007	3.103

a. Predictors: (Constant), indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan

b. Dependent Variable: Y2

Hasil Uji Autokorelasi diatas menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson berada diantara 1 sampai 3 yaitu sebesar 3.103 maka data dinyatakan lulus dari uji autokorelasi. Dengan demikian data valid dan dapat dilakukan analisis selanjutnya.

2. Hasil Analisis Path Analysis

Path Analysis atau analisis jalur terbagi dalam analisis pengaruh langsung dan analisis tidak langsung. Jika pengaruh langsung lebih besar dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung, maka variabel intervening kurang berperan dan sebaliknya.

Hasil Persamaan 1 ($Y_2 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$)

Tabel 4.9
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.612 ^a	.374	.124	.85661

a. Predictors: (Constant), indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan

Tabel 4.10
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	70.631	62.308		1.134	.308
pengeluaran pemerintah sektor kesehatan	.002	.006	.322	.362	.732
indeks pembangunan manusia	.832	.828	.893	1.005	.361

a. Dependent Variable: Y2

Hasil Persamaan 2 ($Y_2 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$)

Tabel 4.11
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.849 ^a	.720	.608	.57269

a. Predictors: (Constant), indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan

Tabel 4.12
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	37.110	18.006		2.061	.094
pengeluaran pemerintah sektor pendidikan	.001	.000	.626	2.545	.052
indeks pembangunan manusia	-.398	.229	-.427	1.737	.143

a. Dependent Variable: Y2

Hasil Persamaan 3 ($Y1 = PY1X1 + e$)

Tabel 4.13
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.917 ^a	.841	.815	.42246

a. Predictors: (Constant), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan

Tabel 4.14
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	75.256	.569		132.253	.000
pengeluaran pemerintah sektor kesehatan	.006	.001	.917	5.644	.001

a. Dependent Variable: Y1

Hasil Persamaan 4 ($Y1 = PY1X2 + e$)

Tabel 4.15
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.273 ^a	.075	-.080	1.02074

a. Predictors: (Constant), pengeluaran pemerintah sektor pendidikan

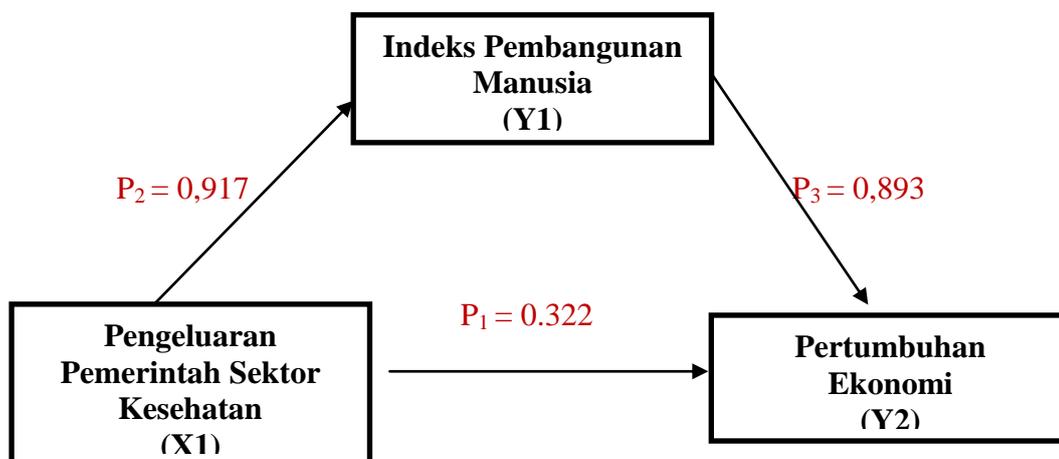
Tabel 4.16
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	78.603	.508		154.812	.000
pengeluaran pemerintah sektor pendidikan	.000	.001	-.273	-.695	.513

a. Dependent Variable: Y1

D. Interpretasi Hasil Path Analysis

1. Pengaruh Pengeluaran pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening.



Gambar 4.3 Hasil Interpretasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui IPM Sebagai Variabel Intervening

Berdasarkan gambar di atas, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dapat berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan ke Indeks Pembangunan Manusia (sebagai variabel intervening) lalu ke Pertumbuhan Ekonomi.

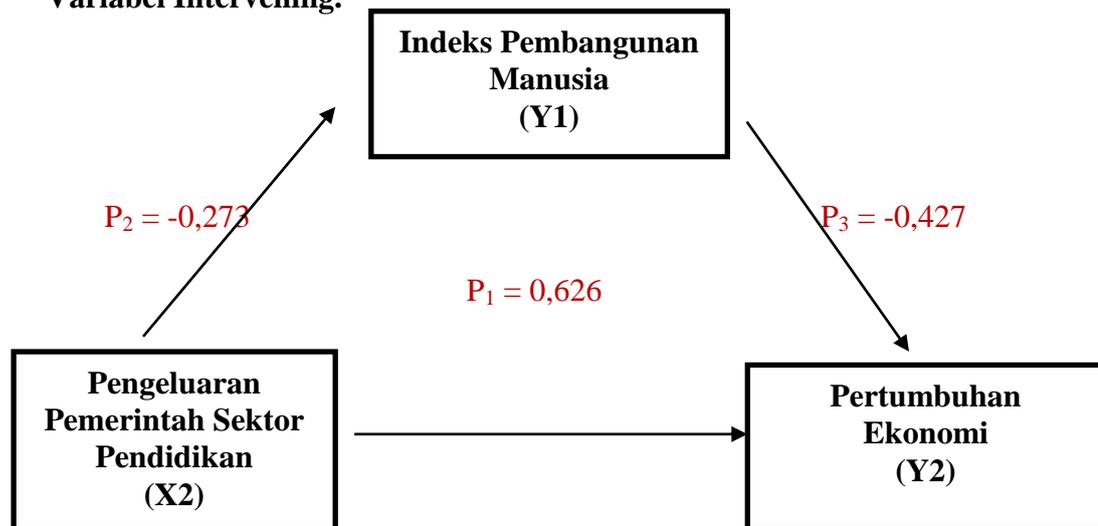
- Besarnya Pengaruh **langsung** Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi ($P1$) = 0,322
- Besarnya pengaruh **tidak langsung** Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Indeks Pembangunan Manusia yaitu ($P2 \times P3$) ($0,917 \times 0,893$) = 0,818
- Besarnya pengaruh **total sebagai pengaruh mediasi** Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Indeks Pembangunan Manusia (pengaruh langsung + pengaruh tidak langsung) = $0,322 + 0,818 = 1,14$
- Kesimpulan nilai **total sebagai pengaruh mediasi** lebih besar dari nilai pengaruh **langsung** dan **pengaruh tidak langsung**.

Hasil perhitungan yang didapat menunjukkan :

Nilai pengaruh langsung ($P1$) = 0,322 lebih kecil dari nilai pengaruh tidak langsung ($P2 \times P3$) = 1,14, maka H_0 diterima, artinya Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Indeks pembangunan Manusia sebagai variabel intervening. Atau dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia menjadi variabel yang memediasi/intervening antara Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap

Pertumbuhan Ekonomi, maka Indeks Pembangunan Manusia berfungsi sebagai variabel intervening.

2. Pengaruh Pengeluaran pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening.



Gambar 4.4 Hasil Interpretasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui IPM Sebagai Variabel Intervening

Berdasarkan gambar di atas, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dapat berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan ke Indeks Pembangunan Manusia (sebagai variabel intervening) lalu ke Pertumbuhan Ekonomi.

- Besarnya Pengaruh **langsung** Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (P_1) = 0,626
- Besarnya pengaruh **tidak langsung** Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Indeks Pembangunan Manusia yaitu ($P_2 \times P_3$) $(-0,273) \times (-0,427) = 0,116$

- Besarnya pengaruh **total sebagai pengaruh mediasi** Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Indeks Pembangunan Manusia (pengaruh langsung + pengaruh tidak langsung) = $0,626 + 0,116 = 0,742$
- Kesimpulan nilai **total sebagai pengaruh mediasi** lebih besar dari nilai pengaruh **langsung** dan **pengaruh tidak langsung**.

Hasil perhitungan yang didapat menunjukkan :

Nilai pengaruh langsung ($P1$) = 0,626 lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung ($P2 \times P3$) = 0,116, maka H_0 ditolak, artinya Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Indeks pembangunan Manusia sebagai variabel intervening. Atau dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak menjadi variabel yang memediasi/intervening antara Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, maka Indeks Pembangunan Manusia tidak berfungsi sebagai variabel intervening.

E. Pembahasan

1. Pengaruh Pengeluaran pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening.

Kesehatan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan, dengan keadaan badan yang sehat manusia bisa melakukan beraktivitas dengan bebas. Dalam semua kebutuhan hidup manusia harus memiliki stamina yang sehat agar produktivitas seseorang tidak akan terganggu, oleh sebab itu kesehatan merupakan hal yang tidak lepas dari pola hidup manusia itu sendiri. Pemerintah

sangat berperan penting atas kebijakan yang seharusnya memperhatikan salah satu hal dalam suatu pembangunan manusia yakni seperti kesehatan, oleh sebab itu pemerintah harus memperhatikannya dengan serius melalui alokasi anggaran pada sektor kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji interpretasi path analysis pada variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh signifikan sebesar 0,322 atau pengaruh langsung (P1) lebih kecil dari nilai pengaruh tidak langsung (P2 x P3) sebesar 1,14, sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa H_a diterima H_o ditolak. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi melalui Indeks Pembangunan Manusia di Kota Medan tahun 2010-2017. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mahulauw dan Mahardika (2016) yang menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan berpengaruh sebesar positif dan signifikan. Hasil tersebut menunjukkan angka yang positif dengan taraf tingkat kesalahan sebesar 0,05 nilai signifikansinya mencapai angka 0,0001. Kesimpulannya dalam temuan tersebut bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan menunjukkan angka yang positif.

Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan dalam Undang-Undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat

dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji. Artinya, setiap tahun pengeluaran belanja pemerintah bidang kesehatan Kota Medan setiap tahun meningkat akan tetapi tidak mempengaruhi indeks pembangunan manusia diobjek penelitian tahun 2010-2017. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan yang tidak dipengaruhi indeks pembangunan manusia dikarenakan pengeluaran belanja pemerintah bidang kesehatan yang tidak sesuai dengan adanya UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji, pengeluaran kesehatan pada tahun 2010-2017 kurang dari 10 persen. Sudah seharusnya pemerintah Kota Medan memikirkan dan mengalokasikan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan pada tingkat yang pantas atau sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, agar fasilitas dan pelayanan kesehatan dapat dinikmati segala golongan bukan hanya golongan atas saja melainkan juga golongan bawah yang sudah sepatutnya sangat menjadi perhatian pemerintah. Ketika kesehatan masyarakat diperhatikan maka sangatlah mungkin tidak ada lagi masyarakat yang mengalami kekurangan gizi, masyarakat yang sakit dapat berobat walaupun dalam keadaan serba kekurangan. Kesehatan merupakan hal yang penting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, keadaan tubuh yang sehat masyarakat bisa belajar dan bekerja, maka dengan meningkatnya pendidikan dan kesehatan akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas daya masyarakat, yang pada

gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian diharapkan kondisi ini akan memajukan perekonomian masyarakat dengan bertambahnya kesempatan kerja serta berkurangnya kemiskinan di Kota Medan.

2. Pengaruh Pengeluaran pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening.

Pendidikan adalah salah satu tonggak dalam suatu perekonomian, dengan melalui sistem pendidikan akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat terbentuk dengan baik. Pemerintah sangat berperan penting atas dalam suatu pembangunan, salah satunya seperti pembangunan manusia dan meningkatkan produktivitas yang dapat di bentuk melalui dengan adanya pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji interpretasi path analysis pada variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh signifikan sebesar 0,626 atau pengaruh langsung (P1) lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung (P2 x P3) sebesar 0,116, sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa H_a ditolak H_o diterima. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia di Kota Medan selama tahun 2010-2017.

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Indeks Pembangunan Manusia di Kota Medan dari tahun 2010-2017.

Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Baeti (2013), Astri dkk (2013) dan Kahang (2016), yang mengatakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini mungkin terjadi, karena pada periode tahun pengamatan penelitian tersebut, anggaran pengeluaran pemerintah sektor pendidikan masih sangat kecil jika dibandingkan dengan alokasi pengeluaran ataupun belanja pemerintah lainnya.

Pemerintah harus menempatkan pendidikan sebagai faktor penting dalam menunjang dalam pembangunan suatu daerah. Hal tersebut terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan. Pemerintah menyediakan anggaran minimal 20% dari total belanja daerah untuk bidang pendidikan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pada sektor pendidikan terealisasi dengan tepat sasaran hal ini terlihat dari karena lebih 20% dari total belanja daerah di sektor pendidikan.

Diharapkan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dapat lebih ditingkatkan lagi supaya mampu terealisasikan kesemua dengan baik pada bagian sektor pendidikan sehingga tingkat indeks pembangunan manusia di Kota Medan dapat meningkat lebih baik dan melihat pertumbuhan peningkatan indeks pembangunan manusia yang lebih besar di Kota. Dengan adanya pendidikan yang

semakin baik maka akan memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu dan sehingga pendidikan bisa dinikmati bukan hanya pada golongan atas melainkan juga masyarakat kalangan bawah. Pemerintah merupakan instrumen kunci kebijakan yang sudah seharusnya sangat memperhatikan hal pokok dalam proses pembangunan ekonomi, melalui ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas tersebut nantinya akan pentingnya skala ekonomi dan pembentukan keahlian dan kualitas manusia sejahtera. Dengan begitu akan mengurangi angka pengangguran yang selama ini menjadi masalah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat, output agregat dari barang dan jasa dan PDRB suatu daerah yang secara otomatis dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia. Dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan pendapatan bagi negara atau wilayah serta akan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat di Kota Medan yang menjadi salah satu indeks komposit dalam penghitungan IPM.
2. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dimana setiap terjadi perubahan pada Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Medan.
3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dimana setiap terjadi perubahan pada pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Medan.
4. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Medan, artinya peningkatan indeks pembangunan manusia akan secara langsung

menaikkan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Medan secara signifikan. Sebab dalam IPM terhadap indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks kelayakan hidup, sehingga IPM adalah salah satu indikator mengapa sebuah kota dapat meningkatkan sumber daya manusia yang baik.

5. Pengeluaran Pemerintah atas Kesehatan secara Analisis Jalur berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Indeks Pembangunan Manusia.
6. Pengeluaran Pemerintah atas Pendidikan secara Analisis Jalur tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Indeks Pembangunan Manusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka adapun beberapa saran yang diajukan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah untuk lebih menentukan program prioritas dalam peningkatan IPM maupun laju pertumbuhan ekonomi tidak harus meningkatkan nilai belanja kesehatan maupun pendidikan secara global karena proporsi biaya tidak langsung seperti belanja pegawai dan pembangunan prasarana fisik tidak berpengaruh secara nyata.
2. Diharapkan agar bisa menimbulkan efek positif terhadap peningkatan IPM perlu dipilah pengeluaran pemerintah sektor kesehatan maupun sektor pendidikan yang hanya untuk program kegiatan peningkatan IPM dan tidak termasuk belanja untuk gaji dan tidak langsung lainnya.
3. Pada penelitian selanjutnya agar lebih meningkatkan nilai korelasi antar kedua sektor maka jumlah data seriesnya perlu diperbanyak, serta lebih

terperinci lagi berdasarkan pengeluaran biaya yang benar-benar berdampak terhadap peningkatan IPM dan laju pertumbuhan ekonominya.

4. Bagi Pemerintah Kota Medan yang akan datang dituntut lebih meningkatkan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan yang baik bagi masyarakat, melalui pengalokasian anggaran pembangunan pendidikan yang besar lagi. Alokasi anggaran pendidikan hendaknya lebih banyak digunakan untuk meningkatkan kapasitas para pendidik guna meningkatkan mutu pendidikan di Kota Medan.
5. Untuk Pemerintah Kota Medan hendaknya dapat meningkatkan lagi anggaran belanja daerah sektor kesehatan agar masyarakat dapat merasakan dampak dari fasilitas pelayanan kesehatan Publik berupa tenaga kesehatan yang profesional didukung oleh infrastruktur berupa rumah sakit dan puskesmas.
6. Kepada peneliti selanjutnya supaya melanjutkan penelitian dengan menambah jumlah variabel dan rentang waktu penelitian agar memperoleh hasil yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abjan. (2016). *Determinasi Anggaran Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Halmahera Barat*. Jurnal. Ternate: Universitas Khairun.
- Adi Widodo, dkk. (2011). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Jawa Tengah*. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan.
- Arifin, Y. M., dkk. (2015). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Sektor Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. Ilmiah. Jember: Universitas Jember.
- Astri, Meylina. (2013). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis.
- Azizah, N. (2016). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di PBeberapa Kabupaten Pesisir Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Dwilita, H. (2019). PERBANDINGAN KINERJA PERBANKAN INDONESIA STUDI PADA BANK UMUM KONVENSIONAL DAN BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2008-2017. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 10(1), 145-162.
- Fadly, Y. (2019). PERFORMA MAHASISWA AKUNTANSI DALAM IMPLEMENTASI ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE (ESP) DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI (UNPAB) MEDAN. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 9(2), 190-201.
- Fauji, Z. (2017). *Pengaruh Belanja Bidang Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung*. Skripsi. Lampung: Universitas Lampung.
- Fithri. N, David Kaluge. (2017). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Malang: Universitas Brawijaya.
- Habeahan. (2015). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Pakpak Bharat (Sumatera Utara) Periode 2004-2013*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.
- Kahang. M., dkk. (2016). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal Samarinda: Universitas Mulawarman.

- Laisina, C., et al. (2015). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap PDRB Melalui Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara. Jurnal Ilmiah.*
- Mahyuni. (2013). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Selatan Periode 2000-2010. Skripsi.* Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Maisyarah, R. (2018). Analysis of the Determinants Competition Oligopoly Market Telecommunication Industry in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 760-770.
- Maisyarah, R., & Sofyardi, M. (2018, January). The Effect of Rice Subsidy on The Expenditure of Public Family Consumption And Welfare of Poor Households. In 1st Economics and Business International Conference 2017 (EBIC 2017). Atlantis Press.
- Muksalmina (2011). *Analisis Pengaruh Pembiayaan Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli Masyarakat Terhadap Perubahan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh. Jurnal Ekonomi: Universitas Syiah Kuala.*
- Mirza, Danni S. (2012). *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. Economics Development Analysis Journal.*
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi E-Budgeting Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 669-693.
- Nasution, N. A. (2019). TATA CARA PELAPORAN PAJAK TERHUTANG SURAT PEMBERITAHUAN MASA TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA CV. BINA REKAYASA. *JURNAL PERPAJAKAN*, 1(1), 37-53.
- Panggabean, F. Y. (2019). Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini Audit. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(2), 151-159.
- Pratama. Y. M. (2018). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. Ilmiah.* Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Purba, R. B. (2018). PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, TRANSPARANSI PUBLIK DAN AKTIVITAS PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.
- Rafiqi, Sutikno, Wijanarko. (2011). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Seluruh Kabupaten Pulau Madura Tahun 2002-2011.* Madurea.

- Ritonga, M. (2018). FAKTOR MANAJEMEN BIAYA DAN MANAJEMEN PEMASARAN TERHADAP PENDAPATAN MELALUI INTENSITAS PRODUKSI PADA UKM INDUSTRI RUMAHAN DI KOTA BINJAI. *JUMANT*, 8(2), 68-78.
- Saggelorang, M. M. S., dkk. (2015). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Selatan*. *Jurnal*. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Samrin, S., Irawan, M., & Se, M. (2019). Analisis Blue Ocean Strategy Bagi Industri Kerajinan Di Kota Tanjung Balai. *Jurnal Manajemen*, 11(1).
- Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index. *Int. J. Bus. Manag. Invent*, 6(7), 62-65.
- Sari, P. B., & Dwilita, H. (2018). Prospek Financial Technology (Fintech) Di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Kemiskinan. *Kajian Akuntansi*, 19(1), 09-18.
- Septiana M.M, Sanggelorang, dkk. (2015). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara*. *Jurnal Berkala Ilmiah*.
- Siregar, O. K. (2019). Pengaruh Deviden Yield Dan Price Earning Ratio Terhadap Return Saham Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 Sub Sektor Industri Otomotif. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 60-77.
- Suparno, H. (2014). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur*. *Skripsi*. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Supraja, G. (2019). PENGARUH IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DAN EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 115-130.
- Usmaliadanti, S. (2011). *Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa tengah Tahun 2007-2009*.
- Wahid, A. B. (2012). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Makassar Periode 1996-2010*. *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Winarti, A. (2014). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, dan PDB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 1992-2012*. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.